

## KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) DI BALAI BAHASA JAWA BARAT

**Reyhan Rahadian<sup>1</sup>; Candradewini Candradewini<sup>2</sup>; Mas Dadang Enjat Munajat<sup>3</sup>**

*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,  
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

<sup>1</sup>[reyhan16003@mail.unpad.ac.id](mailto:reyhan16003@mail.unpad.ac.id); <sup>2</sup>[candradewini@unpad.ac.id](mailto:candradewini@unpad.ac.id); <sup>3</sup>[mdenjatm@unpad.ac.id](mailto:mdenjatm@unpad.ac.id)

### ABSTRACT

*This research is the result of research on communication in the implementation of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) program at the West Java Language Center. UKBI is a measuring test tool to measure a person's proficiency in good and correct Indonesian. This research was motivated by the existence of problems, namely, the promotion of the UKBI program carried out by the West Java Language Center was not comprehensive or evenly distributed, the existing facilities and infrastructure at the West Java Language Center were inadequate. The purpose of this study was to determine how communication is in the implementation of the UKBI program at the West Java Language Center. This study aims to determine communication in the implementation of the UKBI program so far. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and field study observations, interviews, documentation studies. The results of the study show that communication in the implementation of the UKBI program has been running but needs to be improved. Socialization carried out in several places or agencies is still not evenly distributed. This needs to be further improved so that the implementation of UKBI runs even better and achieves the target in accordance with the desired target.*

**Keyword:** *Communication, Implementation Program, UKBI*

### COMMUNICATION IN IMPLEMENTATION OF THE INDONESIAN LANGUAGE PROFICIENCY TEST PROGRAM (UKBI) IN WEST JAVA LANGUAGE CENTER

#### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat. UKBI merupakan alat tes ukur untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, promosi program UKBI yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat belum menyeluruh atau merata, sarana dan prasarana yang ada di Balai Bahasa Jawa Barat ada yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program UKBI selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam implementasi program UKBI sudah berjalan namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat atau instansi masih belum merata. Hal itu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan UKBI berjalan lebih baik lagi dan mencapai target sesuai dengan target yang diinginkan.

**Kata kunci:** Komunikasi, Implementasi Program, UKBI

#### PENDAHULUAN

Persoalan bahasa sering luput dari perhatian masyarakat karena sebagian masyarakat Indonesia belum memahami kedudukan dan fungsi bahasa yang menjadi alat komunikasi masyarakat setiap hari. Sebagian masyarakat memahami fungsi

bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi saja, padahal bahasa Indonesia memiliki fungsi utama lainnya yaitu sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi negara dan bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa

dan sebagai sarana komunikasi bagi antardaerah dan antarbudaya daerah di Indonesia. Sementara dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa resmi kenegaraan, bahasa media massa, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa pengembangan dan bahasa dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi. Dengan kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi negara dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional merupakan cita-cita pendiri bangsa. Generasi penerus bangsa terus berusaha untuk menempatkan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukannya dan berusaha mewujudkan cita-cita pendiri bangsa tersebut. Beberapa perangkat kebahasaan mengalami penyesuaian dengan kebutuhan pengguna bahasa Indonesia melalui konvensi pakar dan penelitian. Perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia telah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa pergaulan, dan bahasa kekerabatan.

Dalam menempatkan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukannya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Peraturan Menteri bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum sebagai pembantu Presiden sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi, serta kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: "Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis". Sesuai dengan amanat dari Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 mengenai Standar Kemahiran Berbahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (selanjutnya disebut Badan Bahasa) mengembangkan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Badan Bahasa merupakan salah satu unit

utama yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bekerja dalam bidang kebahasaan dan kesastraan dan mengurus persoalan 3 (tiga) jenis bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia secara tulis dan lisan yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara serta kemahiran dalam merespons kaidah bahasa Indonesia. Soal-soal di dalam UKBI disusun berdasarkan tingkat performansi seseorang dalam serangkaian kemahiran berbahasa dengan tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Tes UKBI ini merupakan wujud realisasi dari kebijakan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 dengan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia. UKBI dikembangkan oleh Pusat Bahasa Departemen Nasional sejak tahun 1997, sebagai rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia III, dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pendidikan Nasional, Dr. Bambang Sudibyo pada tahun 2006. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki alat evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia sesuai kedudukannya, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Tujuan dari program UKBI ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa UKBI bertujuan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia secara tulis dan lisan yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara serta kemahiran dalam merespons kaidah bahasa Indonesia sesuai dari amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Sasaran target dari program UKBI ini adalah masyarakat umum hingga pelajar, tidak ada batasan umur untuk melakukan tes UKBI. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ke Balai Bahasa Jawa Barat sebagai implementor tes

UKBI di Jawa Barat. Balai Bahasa Jawa Barat melakukan tugas-tugasnya seperti menyiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan tes UKBI, menyiapkan tes ujiannya dengan bantuan banyak ahli, dan menilai hasil tes UKBI seseorang yang dilakukan oleh juri yang dipilih oleh Badan Bahasa. Balai Bahasa Jawa Barat juga berperan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program UKBI kepada masyarakat.

Pengujian UKBI dikoordinasi dan/atau dilaksanakan oleh Badan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Sementara itu, Balai dan Kantor Bahasa yang tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Bahasa dapat secara langsung menjadi *ex officio* atau anggota suatu Badan sebagai Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI). Sedangkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai perwakilan Pemerintah di luar negeri, terutama KBRI yang memiliki Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), dapat menjadi TUKBI *ex officio* dengan syarat mengajukan surat permohonan menjadi TUKBI seperti di Thailand, Singapura, dan Australia. Lembaga atau instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti universitas atau lembaga kursus bahasa Indonesia dapat menjadi Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Bahasa pada tahun 2017, ditetapkan 32 tempat pelaksanaan UKBI, yaitu 2 TUKBI di Jakarta dan 30 TUKBI yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisa data reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahannya menggunakan teknik trigulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan dan menganalisis data yang penulis peroleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data-data tersebut penulis gunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan mengenai komunikasi dalam implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat. Data diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam komunikasi implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat yang meliputi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dan Balai Bahasa Jawa Barat. Hasil pengumpulan data yang telah diperoleh penulis akan menggunakan teknik analisis data seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dikembangkan dari pedoman wawancara, diperoleh informasi empirik tentang objek penelitian, yang selanjutnya diedit, direduksi dan disajikan serta diverifikasi dan diinterpretasikan guna menjawab pertanyaan penelitian. Langkah terakhir adalah merumuskan jawaban akhir terhadap masalah penelitian yang diajukan dan dirumuskan jawaban yang sesuai kebenaran empirik hasil penelitian yang diintegrasikan dengan sikap penelitian sendiri.

Pemerintah Pusat sebagai pengelola negara memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam perjalanan menuju terwujudnya tujuan negara. Implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengatasi semua permasalahan di bidang bahasa dan sastra. Program UKBI ini bertujuan untuk menempatkan kedudukan Bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Adanya sebuah program yang merupakan bentuk upaya pencapaian suatu tujuan tentunya tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi yang baik akan mempengaruhi hasil dan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, meninjau komunikasi dalam sebuah implementasi merupakan bagian yang sangat penting. Mengingat banyak hal yang akan mempengaruhi proses implementasi, maka perlu dilakukan pengamatan atas hal-hal yang mempengaruhi proses implementasi tersebut, agar proses implementasi yang sedang atau yang akan dilakukan selanjutnya dapat dilakukan dengan baik.

Pembahasan berikut akan menganalisis dan menjelaskan mengenai sejauhmana komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat. Salah satu aspek yang dapat mengukur keberhasilan implementasi yaitu Komunikasi.

Implementasi kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Edward III dalam Subarsono, 2011 : 90). Salah satu syarat pertama dalam proses implementasi program yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu betul apa yang seharusnya mereka lakukan. Komunikasi yang baik dan benar akan menghasilkan implementasi program yang baik juga. Banyak hambatan yang terjadi pada bagian transmisi komunikasi implementasi, bagaimanapun hambatannya tetap akan menghambat keberlangsungan program UKBI. Sebuah kebijakan harus diterapkan dengan baik, petunjuk pelaksanaan dari pembuat kebijakan tidak hanya harus diterima, dengan catatan petunjuk dari kebijakan tersebut juga harus jelas. Jika petunjuk tidak jelas, pegawai akan kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan mempunyai wewenang untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka. Dalam komunikasi, masalah yang diciptakan oleh kurangnya kejelasan dalam petunjuk pelaksanaan harus diperiksa dan perlu penjelasan tentang mengapa ambiguitas ini terjadi dan harus dievaluasi.

Untuk implementasi yang efektif, para implementor dalam mengimplementasikan keputusan harus tahu secara jelas apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk melaksanakan sebuah kebijakan harus ditularkan kepada pegawai yang tepat, dan harus jelas, konsisten, dan akurat. Jika pengambil keputusan kebijakan membuat arah yang kurang jelas, maka kebijakan tersebut mungkin akan disalahpahami oleh pegawai. Hal tersebut dapat mengurangi nilai implementasi. Pengetahuan yang tidak cukup mengenai komunikasi juga berakibat pada upaya mengubah kebijakan umum menjadi tindakan spesifik. Keleluasan mengganti kebijakan ini belum tentu dilakukan karena tidak sesuai dengan arah dan tujuan dari pembuat keputusan aslinya. Dengan demikian, pelaksanaan instruksi yang tidak tersosialisasikan, yang terdistorsi dalam transisi, atau yang tidak konsisten atau tidak jelas, akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut informan yang penulis wawancarai di Balai Bahasa Jawa Barat, tujuan sosialisasi yang dilakukan adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan pentingnya program UKBI. Sosialisasi itu sendiri sangat penting, karena bila tidak ada proses sosialisasi, banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui tentang program UKBI sehingga target dari program itu tidak tercapai. Sosialisasi itu sendiri merupakan suatu upaya untuk mengenalkan program UKBI kepada masyarakat sehingga menjadi dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi UKBI sangat penting untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang keunggulan atau kelebihan dari program UKBI. UKBI memiliki keunggulan untuk memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan warga negara. Saat ini sudah ada beberapa tempat kerja ataupun program yang menjadikan UKBI sebagai syarat masuknya. Dengan kata lain, UKBI dapat membantu warga negara kita yang akan mendapatkan pekerjaan atau masuk ke suatu program Bahasa.

Sosialisasi yang dilakukan mempunyai banyak bentuknya, contohnya dengan melakukan kegiatan diskusi, pelatihan, atau seminar bagi perwakilan

masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang diundang. Dengan harapan, mereka yang diundang akan menyampaikan informasi tersebut kepada yang lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan, kegiatan sosialisasi tentang program UKBI yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat pada tahun 2020 dilakukan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Sosialisasi program UKBI dilakukan di 5 (lima) kota berbeda di Jawa Barat, yaitu kota Ciamis, Cianjur, Garut, Majalengka, dan Purwakarta. Sosialisasi yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di setiap kota. Melalui kerja sama yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan di kota yang sudah disebutkan, Balai Bahasa Jawa Barat melakukan pertemuan dan memberi edukasi mengenai program UKBI, pentingnya program UKBI, dan mengapa harus melakukan program UKBI seperti amanat dari Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

## SIMPULAN

### 1. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat sudah berjalan namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang sudah berjalan, tetapi baru di beberapa tempat atau instansi atau belum merata. Hal itu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan UKBI berjalan lebih baik lagi dan mencapai target sesuai dengan target yang diinginkan.

### 2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti selanjutnya ingin mencoba untuk memberikan saran mengenai komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat.

Sosialisasi mengenai program UKBI harus lebih ditingkatkan lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang

dilakukan harus secara merata dilakukan ke setiap kota sesuai sasaran dari program UKBI. Peningkatan sosialisasi bisa dilakukan melalui laman Balai Bahasa Jawa Barat, media sosial, brosur, media massa cetak maupun elektronik, pelatihan atau seminar dengan sasaran yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Hartanto. (2019). "Problematika Guru SMP dalam Tes Menulis Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Mabasindo*, 3 (1): 42-56.
- Islami, A, M, N. (2017). *Implementasi Program Pendidikan Full Day School Di MI Muhammadiyah Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**DOKUMEN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 201

Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016

